



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN  
TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.

Laporan Kinerja (LKj) ini disajikan untuk memberikan informasi atas hal-hal yang telah dikerjakan selama tahun 2019. Laporan Kinerja ( LKj ) menyajikan perbandingan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi pelaksanaannya. Laporan Kinerja (LKj) antara lain bertujuan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa apa yang kami sajikan masih jauh dari sempurna, namun kami berharap ada manfaatnya dan dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan saran, tanggapan serta kritik yang sifatnya membangun untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini.

Banjarbaru, Februari 2020  
**Kepala Dinas Koperasi, UKM dan  
Tenaga Kerja  
Kota Banjarbaru**



**Ir. MUH. RUSTAM, MP**

NIP. 19641019 199103 1 004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Struktur Organisasi .....	1
C. Visi dan Misi SKPD .....	10
D. Strategi dan Arah Kebijakan SKPD .....	11
E. Tujuan dan Sasaran.....	11
F. Program dan Kegiatan .....	12
BAB II    PERENCANAAN KINERJA .....	15
A. Perjanjian Kinerja.....	15
B. Program Utama dan Penunjang.....	18
BAB III   AKUNTABILITAS KINERJA .....	19
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	19
B. Realisasi Anggaran .....	43
BAB IV    PENUTUP .....	49

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja (LKj) tahun 2019 Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mendukung pencapaian tujuan/sasaran strategis Pemerintah Kota Banjarbaru. Penyusunan Laporan Kinerja juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja organisasi.

Sasaran Strategis pada Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru ada 4 (empat) yaitu : Meningkatnya kualitas koperasi yang berdaya saing, Meningkatnya produktivitas Usaha Mikro dan Pertumbuhan UMKM baru, Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka, Menurunnya Kasus Ketenagakerjaan. Dimana ada 2 (dua) sasaran strategis tersebut ada yang menjadi Sasaran Strategis Kota Banjarbaru pada tahun 2019 yaitu Meningkatnya produktivitas Usaha Mikro dan Pertumbuhan UMKM baru, Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka.

Berikut realisasi capaian sasaran strategis tahun 2019 pada Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kriteria
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )
1.	Meningkatnya kualitas koperasi yang berdaya saing	Persentase Koperasi yang berkualitas	30%	23,48	78,27	Baik (B)
2.	Meningkatnya produktivitas Usaha Mikro dan Pertumbuhan UMKM baru	Persentase wirausaha baru	23,97%	24,82	103,55	Baik Sekali (B)
		Persentase peningkatan omzet Usaha Mikro	10%	10,00	100,00	Baik (B)
3.	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,10%	5,06	117,05%	Baik Sekali (B)
4.	Menurunnya Kasus Ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan Yang Berkasus Ketenagakerjaan	2,5%	2,38	104,80	Baik Sekali (B)

Dari hasil pengukuran pada 4 (empat) sasaran strategis pada Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru, disimpulkan bahwa ada 3 (tiga) sasaran dapat tercapai dengan mendapat predikat Baik Sekali dan 1(satu) sasaran dapat tercapai dengan mendapat predikat Baik, walau demikian masih terdapat permasalahan yang dihadapi dalam mencapai sasaran tersebut diantaranya :

1. Kurang terbukanya koperasi apabila diadakan pembinaan, monitoring dan evaluasi
2. Belum meratanya Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi yang kompeten dalam mengelola organisasi dan usaha koperasi.
3. Masih belum dilakukan pemutakhiran data UMKM dan teraplikasi dengan benar.
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pembinaan, pemberdayaaan dan promosi UMKM.
5. Masih banyaknya UMKM yang belum memiliki perijinan yang sesuai.
6. Akses pasar UMKM masih terbatas pada pasar lokal dan pasar regional.
7. Dalam pengembangan usaha para pelaku usaha sebagian tidak memiliki agunan dalam memenuhi persyaratan pengajuan pinjaman sebagai tambahan modal usaha.
8. Pekerja dan pengusaha masih banyak yang belum melaporkan penempatan tenaga kerja kepada petugas penempatan tenaga kerja.
9. Kurangnya sarana dan prasarana untuk kegiatan pelatihan dan monitoring ke lapangan.
10. Pengusaha dan pekerja terjadi keluhan kesah tentang penerapan ketentuan ketenagakerjaan dalam hubungan kerja.
11. Pengusaha belum sepenuhnya mengikutkan para pekerja menjadi peserta BPJS.
12. Perusahaan belum membuat/memperpanjang peraturan perusahaan yang menjadi pedoman hubungan industrial antara pengusaha dan kerja.

Untuk mensikapi permasalahan tersebut upaya yang ditempuh dimasa depan adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan Focus Group Discussion (FGD) semua koperasi se Kota Banjarbaru.
2. Melakukan pelatihan peningkatan kapasitas dan kualitas bagi Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi.
3. Melakukan pemutakhiran data UMKM dan melakukan integrasi data dengan dinas terkait.
4. Perlu diadakan sarana dan prasarana pendukung seperti mobil operasional.
5. Melakukan sosialisasi kepada UMKM tentang perijinan.
6. Mengupayakan UMKM untuk dapat mengikuti berbagai pameran dan promosi berskala nasional.
7. Lebih mengoptimalkan hubungan interaksi dengan perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya melalui kegiatan sosialisasi dan informasi dalam perolehan modal.
8. Melakukan sosialisasi ke perusahaan untuk data penempatan tenaga kerja.
9. Perlu diadakan kendaraan operasional untuk kegiatan pelatihan dan monitoring ke lapangan.
10. Melakukan pendekatan persuasif adanya keluhan kesah para pihak terkait adanya perselisihan hubungan industrial dan melalui mediasi.
11. Melakukan monitoring dan pembinaan kepatuhan kepesertaan BPJS ke perusahaan dan melakukan sosialisasi.
12. Melakukan pembinaan kepatuhan untuk membuat peraturan perusahaan melalui surat edaran dan mengadakan kegiatan sosialisasi untuk ketaatan membuat peraturan perusahaan.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

#### **B. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 59 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru terdiri dari :

##### **a) Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis bidang.

##### **b) Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan, umum dan kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan program dibidang perencanaan, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja.
- 2) Penyelenggaraan kegiatan urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- 4) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja.
- 5) Pengawasan/pengevaluasian pelaksanaan kegiatan urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

**Sekretariat terdiri dari :**

**1) Sub Bagian Perencanaan**

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan teknis administrasi perencanaan dan penyusunan program / kegiatan pada semua satuan organisasi dilingkungan Dinas Koperasi , UKM dan Tenaga Kerja.

**2) Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan teknis mengelola administrasi keuangan kepada semua satuan organisasi dilingkungan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja.

**3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan teknis administrasi urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, dan administrasi Kepegawaian Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja.



**c) Bidang Bina Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.**

Bidang Bina Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan, dan perumusan Bidang Bina Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

**Bidang Bina Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :**

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang bina usaha koperasi usaha mikro kecil dan menengah.
- 2) Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang bina usaha koperasi usaha mikro kecil dan menengah.
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan bina usaha koperasi usaha mikro kecil dan menengah.
- 4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang simpan pinjam, permodalan dan pengembangan usaha, serta promosi, pemasaran dan jaringan usaha.
- 5) Pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan simpan pinjam, permodalan dan pengembangan usaha, serta promosi, pemasaran dan jaringan usaha.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bidang Bina Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :**

**1) Seksi Pengelola Lembaga Keuangan**

Seksi Pengelola Lembaga Keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan ketatausahaan, pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan bina usaha koperasi dan fasilitasi simpan pinjam serta menyusun kebijakan operasional pengelolaan usaha simpan pinjam.

## **2) Seksi Permodalan dan Pengembangan Usaha**

Seksi Permodalan dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas melakukan kegiatan pelatihan/bimbingan teknik pengembangan usaha dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dan UMKM serta menyusun bahan petunjuk operasional permodalan koperasi.

## **3) Seksi Promosi, Pemasaran dan Jaringan Usaha**

Seksi Promosi, Pemasaran dan Jaringan Usaha mempunyai tugas melakukan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan akses pasar dan jaringan usaha bagi Koperasi dan UMKM.

### **d) Bidang Kelembagaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Bidang Kelembagaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur, mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan, perumusan, pengembangan dan peningkatan bidang kelembagaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bidang Kelembagaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, mempunyai fungsi yaitu :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan koperasi usaha mikro kecil dan menengah.
- 2) Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelembagaan koperasi usaha mikro kecil dan menengah.
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan pengawasan dan akuntabilitas, organisasi dan tata laksana, serta penyuluhan, pendaftaran dan hukum.
- 4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengawasan dan akuntabilitas, organisasi dan tata laksana, serta penyuluhan, pendaftaran dan hukum.

- 5) Pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pengawasan dan akuntabilitas, organisasi dan tata laksana, serta penyuluhan, pendaftaran dan hukum.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bidang Kelembagaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :**

**1) Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas**

Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas mempunyai tugas menganalisa, menyusun bahan, menentukan dokumen, pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap Koperasi, serta data dan jumlah koperasi simpan pinjam yang akurat

**2) Seksi Organisasi dan Tatalaksana KUMKM**

Seksi Organisasi dan Tatalaksana KUMKM mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia bagi koperasi serta menyusun bahan kebijakan operasional penataan organisasi dan tata laksana koperasi

**3) Seksi Penyuluhan, Pendaftaran dan Hukum**

Seksi Penyuluhan, Pendaftaran dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan penyuluhan koperasi, serta menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi.

**e) Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja**

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, pengendalian dan pelayanan bidang pelatihan dan

penempatan tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja.
- 2) Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja.
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, serta informasi pasar kerja dan analisis produktifitas.
- 4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, serta informasi pasar kerja dan analisis produktifitas.
- 5) Pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, serta informasi pasar kerja dan analisis produktifitas.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :**

**1) Seksi Pelatihan Kerja**

Seksi Pelatihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyelenggara lembaga pelatihan kerja, menyusun perencanaan umum dan pembiayaan pelatihan kerja serta melakukan pemantauan dan evaluasi lembaga pelatihan kerja swasta.

**2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja**

Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melakukan pemberian layanan pendaftaran pencari kerja, informasi lowongan kerja dan

penempatan tenaga kerja lokal (AKL), antar daerah (AKAD), antar negara (AKAN) dan tenaga kerja asing (TKA) serta melaksanakan promosi, pemasaran, peyaluran dan penempatan tenaga kerja.

### **3) Seksi Informasi Pasar Kerja dan Analis Produktifitas**

Seksi Informasi Pasar Kerja dan Analis Produktifitas mempunyai tugas menyiapkan bahan lowongan, penyuluhan kepada pencari kerja, sekolah serta pengumpulan pengolahan data pencari kerja lowongan pekerja untuk laporan informasi pasar kerja (IPK).

### **f) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja**

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, pengendalian dan pelayanan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.
- 2) Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan persyaratan kerja, pengupahan dan jaminan sosial kerja, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- 4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang persyaratan kerja, pengupahan dan jaminan sosial kerja, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- 5) Pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan persyaratan kerja, pengupahan dan jaminan sosial kerja, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :**

**1) Seksi Persyaratan Kerja**

Seksi persyaratan kerja mempunyai tugas melaksanakan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan pembinaan syarat kerja serta menyipakan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis meliputi perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP) dan perjanjian kerja bersama (PKB).

**2) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja**

Seksi pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan teknis pembinaan dan pengawasan pengupahan, kesejahteraan pekerja dan jaminan sosial tenaga kerja.

**3) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**

Seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrial mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam memfasilitasi penyelesaian hubungan industrial.

**g) Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan Fungsi Dinas, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

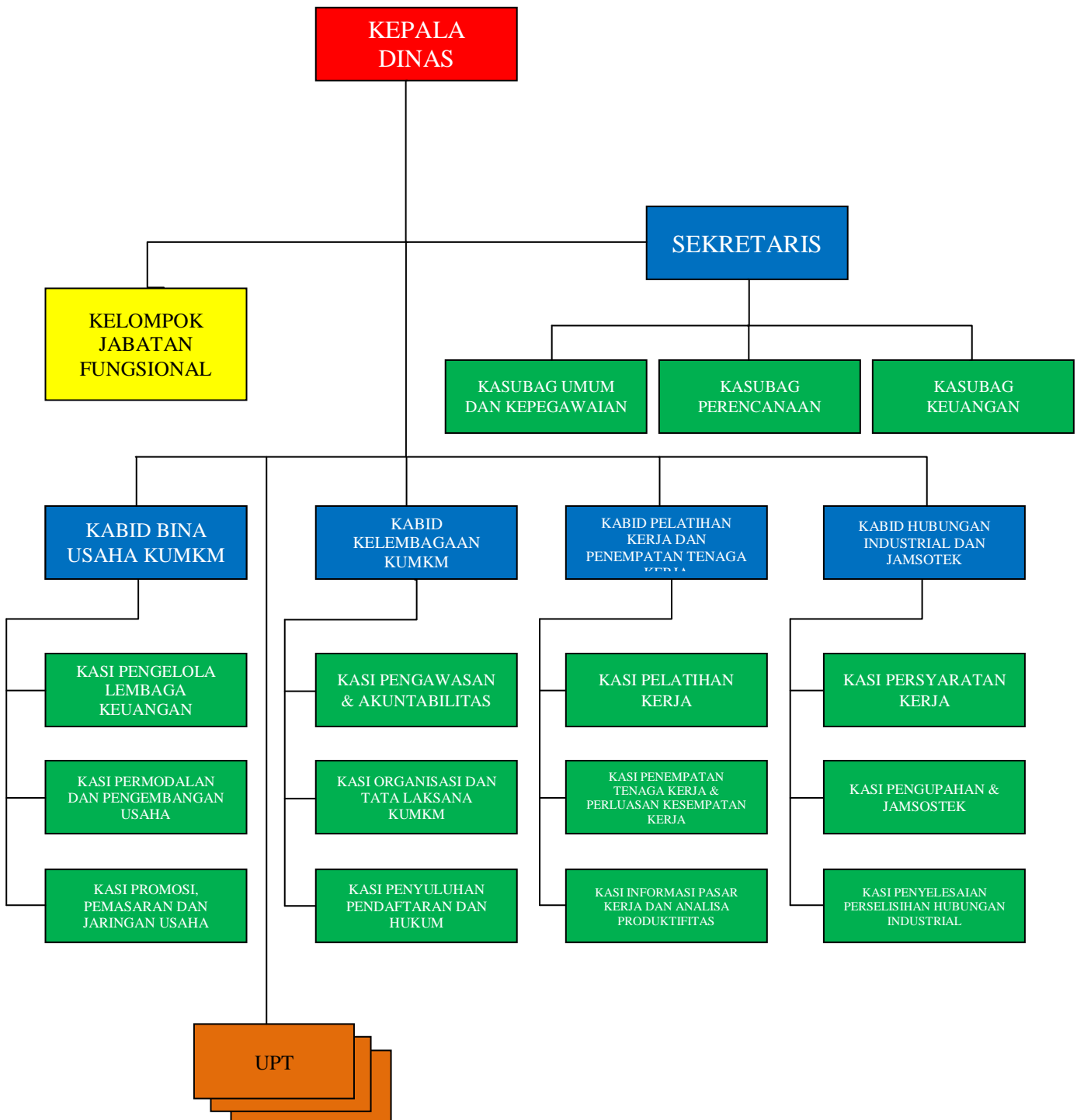
**h) PLUT – KUMKM Kota Banjarbaru**

PLUT - KUMKM merupakan kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM RI yang bertujuan untuk :

- 1) Meningkatkan kualitas kerja Koperasi dan UMKM
- 2) Meningkatkan Kompetensi SDM Koperasi dan UMKM

- 3) Meningkatkan produktivitas potensi unggulan daerah yang dikembangkan oleh Koperasi dan UMKM
- 4) Meningkatnya akses pembiayaan Koperasi dan UMKM
- 5) Meningkatnya daya saing Koperasi dan UMKM
- 6) Meningkatnya jaringan usaha dan kemitraan Koperasi dan UMKM

**Struktur organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja**



## C. VISI DAN MISI SKPD

### 1. VISI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Walikota dan Wakil Walikota, maka Visi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru yang ditetapkan untuk tahun 2016-2021, yaitu :

***Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang berdaya saing guna mewujudkan pembangunan ekonomi yang maju dan mandiri serta Penyelenggara Ketenagakerjaan Terbaik***

### 2. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, maka misi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2016-2021 adalah :

- a) **Meningkatkan kualitas kelembagaan, daya saing dan kemandirian Koperasi dan UMKM**
- b) **Meningkatkan Kompetensi Dan Produktifitas Tenaga Kerja Dalam Upaya Peningkatan Kesempatan Kerja**
- c) **Meningkatkan Perlindungan Ketenagakerjaan**
- d) **Meningkatkan Kualitas Kinerja Dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (good governance)**



## **D. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SKPD**

### **1. STRATEGI**

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021, perlu ditentukan strategi yang akan dijalankan yaitu :

- a) Meningkatkan kewirausahaan melalui pengembangan pendidikan kewirausahaan
- b) Meningkatkan kuantitas dan kualitas koperasi yang berdaya saing
- c) Menurunkan tingkat pengangguran terbuka

### **2. ARAH KEBIJAKAN**

Kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 :

- a) Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi wirausaha baru
- b) Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
- c) Peningkatan keterampilan dan keahlian pencari kerja

## **E. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan pada Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru adalah Meningkatnya perekonomian dan kemandirian daerah di Kota Banjarbaru.

Sasaran pada Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru yaitu :

- a) Meningkatnya kualitas koperasi yang berdaya saing
- b) Meningkatnya produktivitas Usaha Mikro dan Pertumbuhan UMKM baru
- c) Menurunnya tingkat pengangguran terbuka
- d) Menurunnya kasus ketenagakerjaan

## **F. PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **1. Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah**

#### **a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- ❖ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- ❖ Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- ❖ Penyediaan Alat Tulis Kantor
- ❖ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- ❖ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- ❖ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- ❖ Penyediaan Makanan dan Minuman
- ❖ Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- ❖ Penyediaan Jasa Non PNS

#### **b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- ❖ Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- ❖ Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- ❖ Pengadaan Mebeleur
- ❖ Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
- ❖ Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
- ❖ Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
- ❖ Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- ❖ Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
- ❖ Rutin / Berkala Mebeleur

**c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- ❖ Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- ❖ Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan
- ❖ Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang

**d. Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif**

- ❖ Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah
- ❖ Pengembangan Usaha Kecil Menengah
- ❖ Perluasan Akses Pasar bagi Produk UMKM

**e. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah**

- ❖ Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
- ❖ Sarana Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
- ❖ Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan (DAK)

**f. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**

- ❖ Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- ❖ Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Masyarakat

**g. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**

- ❖ Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi berprestasi
- ❖ Penyuluhan Perkoperasian
- ❖ Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi
- ❖ Pembinaan dan Pembenahan Kelompok Usaha Rakyat
- ❖ Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi (DAK)

**2. Urusan Tenaga Kerja**

**a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**

- ❖ Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja

**b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja**

- ❖ Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
- ❖ Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbaris Masyarakat

**c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**

- ❖ Fasilitas Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- ❖ Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan
- ❖ Sosialisasi Upah Minimum Provinsi Kalimantan Selatan
- ❖ Pembinaan dan Penyuluhan Kelembagaan Ketenagakerjaan
- ❖ Penyuluhan Kelembagaan Ketenagakerjaan
- ❖ Forum Lembaga Kerjasama Tripartit
- ❖ Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
- ❖ Pembinaan Jaminan Sosial

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Perjanjian Kinerja**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. MUH. RUSTAM, MP  
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. NADJMI ADHANI  
Jabatan : WALIKOTA BANJARBARU

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
WALIKOTA BANJARBARU

Banjarbaru, Mei 2019  
Pihak Pertama,  
Kepala Dinas  
Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja  
Kota Banjarbaru

H. NADJMI ADHANI

Ir. MUH. RUSTAM, MP  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641019 199103 1 004

Sasaran Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas koperasi yang berdaya saing	Persentase Koperasi yang berkualitas	30%
2	Meningkatnya produktivitas Usaha Mikro dan Pertumbuhan UMKM baru	Persentase Wirausaha baru	23,97%
		Persentase peningkatan omzet Usaha Mikro	10%
3	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,10%
4	Menurunnya Kasus Ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan Yang Berkasus Ketenagakerjaan	2,5%

Jumlah Anggaran Untuk Sasaran :

No	Sasaran Strategis		Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2		3	4
1	Meningkatnya kualitas koperasi yang berdaya saing	1	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	570.540.000
2	Meningkatnya produktivitas Usaha Mikro dan Pertumbuhan UMKM baru	1	Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	356.188.000
		2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	636.973.000
		3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	90.491.250
3	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	523.667.600
		2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	271.119.480
4	Menurunnya Kasus Ketenagakerjaan		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	194.067.650

## B. Program Utama Dan Penunjang

Program unggulan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja terdapat empat program utama yaitu :

1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
3. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
4. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

Sedangkan program penunjang lainnya adalah :

1. Program Penciptaan Iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
3. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
4. Program pelayanan Administrasi perkantoran
5. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan



### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

###### **1. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Dalam penyusunan LAKIP tahun 2019 ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru telah menggunakan indikator sasaran sebagai tolak ukur untuk menilai capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru. Indikator sasaran tersebut melekat pada program-program yang dilaksanakan selama Tahun 2019, tetap berada dibawah tanggung jawab Pemerintah Kota Banjarbaru sebagai Instansi Induk, sedangkan tanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan kewenangannya berada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru

Pengukuran kinerja Pemerintah Banjarbaru menggunakan Permendagri 54 Tahun 2010. Hasil pengukuran kemudian dikategorisasikan pencapaian kinerja ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Rentang Capaian Kinerja</b>	<b>Kategori Capaian Kinerja</b>
1.	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2.	Lebih dari 75% s.d. 100%	Baik (B)
3.	55% s.d. 75%	Cukup (C)
4.	Kurang dari 55%	Kurang (K)

## 2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Analisis atas capaian kinerja untuk masing indikator sasaran dapat terukur dengan Pengukuran Kinerja sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kriteria
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )
1.	Meningkatnya kualitas koperasi yang berdaya saing	Persentase Koperasi yang berkualitas	30%	23,48	78,27	Baik (B)
2.	Meningkatnya produktivitas Usaha Mikro dan Pertumbuhan UMKM baru	Persentase wirausaha baru	23,97%	24,82	103,55	Baik Sekali (B)
		Persentase peningkatan omzet Usaha Mikro	10%	10,00	100,00	Baik (B)
3.	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,10%	5,06	117,05%	Baik Sekali (B)
4.	Menurunnya Kasus Ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan Yang Berkasus Ketenagakerjaan	2,5%	2,38	104,80	Baik Sekali (B)

### 3. Evaluasi Kinerja Organisasi untuk setiap Sasaran Strategis

#### 1. SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kualitas koperasi yang berdaya saing

Sasaran Meningkatkan kualitas koperasi yang berdaya saing dipilih dengan maksud untuk menggambarkan meningkatnya koperasi berkualitas oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, dengan Indikator Persentase koperasi berkualitas ini menunjukkan persentase koperasi yang mendapatkan predikat berkualitas dan cukup berkualitas.

Pengukuran indikator Persentase koperasi berkualitas berdasarkan hasil dari pemeringkatan koperasi. yang dilakukan lembaga independen yang bergerak dibidang perkoperasian.

Adapun capaian Persentase koperasi berkualitas menggunakan rumus jumlah koperasi yang mendapatkan predikat berkualitas dan cukup berkualitas dibagi dengan jumlah koperasi aktif dikalikan seratus persen adalah sebagai berikut :

Tabel I Capaian 2019

No.	Indikator	Satuan	Uraian Kinerja Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase koperasi berkualitas	%	30%	23.48% (31 / 132 x100)	78,27%

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel diatas menunjukan bahwa realisasi Indikator Sasaran “Persentase Koperasi Berkualitas” pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 30 dan terealisasi 23,48 dengan capaian kinerja 78,27% (Kategori Baik).

Dasar hukum dalam melakukan pemeringkatan koperasi adalah :

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 21/Oer/M.KUKM/IX/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Pemeringkatan Koperasi;

Pemeringkatan koperasi meliputi penilaian pada 6 aspek kondisi koperasi yaitu :

1. Aspek badan usaha aktif, ditunjukkan dengan berjalannya mekanisme manajemen koperasi, seperti Rapat Anggota Tahunan (RAT), aktivitas bisnis berjalan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Aspek kinerja usaha yang semakin sehat, ditunjukkan dengan membaiknya struktur permodalan.
3. Aspek kohesivitas dan partisipasi anggota, ditunjukkan dengan keterikatan anggota terhadap anggota lain maupun terhadap organisasi.
4. Aspek orientasi pada pelayanan anggota, ditunjukkan dengan keterkaitan antara usaha koperasi dengan usaha anggota.
5. Aspek pelayanan kepada masyarakat, ditunjukkan dengan seberapa jauh usaha yang dijalankan koperasi dapat menyerap tenaga kerja setempat.
6. Aspek kontribusi terhadap pembangunan daerah, ditunjukkan dengan ketaatan koperasi sebagai wajib pajak dalam membayar pajak.

**REKAPITULASI DATA KERAGAAN KOPERASI  
KOTA BANJARBARU  
POSISI 31 DESEMBER 2019**

NO	IDENTITAS/ KELOMPOK KOPERASI	AKTIF (UNIT)	TIDAK AKTIF (UNIT)	TOTAL KOP
I.	KUD	1	1	2
II.	KPRI	54	13	67
III.	KOPKAR BUMN / BUMD	13	7	20
IV.	KOPPAS	0	2	2
V.	KSU	31	8	39
VI.	KOPERASI FUNGSIONAL (ANGKATAN / POL)	7	0	7
VII.	KOPERASI VETERAN	0	2	2
VIII.	KOPERASI PENSIUNAN	2	2	4
IX.	KOPERASI WANITA	2	2	4
X.	KOPERASI PERKEBUNAN	1	0	1
XI.	KOPERASI PERIKANAN	1	1	2
XII.	KOPERASI PETERNAKAN	1	2	3
XIII.	KOPERASI PROFESI	0	3	3

NO	IDENTITAS/ KELOMPOK KOPERASI	AKTIF	TIDAK AKTIF	TOTAL KOP
		(UNIT)	(UNIT)	
XIV.	KOPERASI PERTANIAN	2	3	5
XV.	KOPPONTREN	1	1	2
XVI.	KOPERASI KREDIT	1	0	1
XVII.	KOPERASI SYARIAH / KJKS	4	1	5
XVIII.	KOPERASI SIMPAN PINJAM	6	0	6
XIX.	KOPERASI MAHASISWA	1	0	1
XX.	KOPERASI KERAJINAN	2	0	2
XXI.	KOPERASI JASA ANGKUT DARATA	1	0	1
XXII.	KOPERASI SEKUNDER	1	0	1
	<b>TOTAL</b>	<b>132</b>	<b>48</b>	<b>180</b>

Pemeringkatan Koperasi di Banjarbaru menggunakan Permenkop dan ukm Nomor 21/Oer/M.KUKM/IX/2015. Hasil pengukuran dikategorisasikan ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut :

No.	Peringkat	Skor
1.	Sangat Berkualitas	>419
2.	Berkualitas	340 – 419
3.	Cukup Berkualitas	260 – 339
4.	Kurang Berkualitas	180 – 259
5.	Tidak Berkualitas	<180

**REKAPITULASI DATA KOPERASI HASIL PEMERINGKATAN KOPERASI  
KOTA BANJARBARU  
SAMPAI DENGAN TAHUN 2019**

No.	Peringkat	Jumlah Koperasi
1.	Sangat Berkualitas	0
2.	Berkualitas	5
3.	Cukup Berkualitas	26
4.	Kurang Berkualitas	2
5.	Tidak Berkualitas	4

Berdasarkan data tabel dari pemeringkatan koperasi pada tahun 2015, 2017 dan 2019 diatas dapat diketahui bahwa jumlah koperasi berkualitas dan

cukup berkualitas di Kota Banjarbaru berjumlah 31 koperasi dan jumlah koperasi aktif di Kota Banjarbaru berjumlah 132 koperasi.

Indikator ini tidak bisa mencapai target yang ditetapkan dikarenakan keterbatasan dana untuk melakukan pemeringkatan koperasi, sedangkan jumlah pertumbuhan koperasi baru di Kota Banjarbaru semakin meningkat. Serta Masih banyaknya koperasi aktif yang belum tertib administrasi.

Tabel II Perbandingan 2 tahun terakhir

No.	Indikator Kinerja	2017		2018		2019	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Persentase koperasi berkualitas	22,32%	100%	19,84%	88,57%	23.48%	78,27%

Realisasi kinerja indikator “Persentase Koperasi Berkualitas” tahun 2017 adalah 22,32% dan tahun 2018 adalah 19,84% dan tahun 2019 adalah 23,48% sehingga terlihat peningkatan sebesar 3,65%, hal ini menggambarkan Koperasi Berkualitas mengalami peningkatan.

Pada tahun 2017 target capaian Persentase koperasi berkualitas dapat tercapai sedangkan pada Tahun 2018 target capaian tidak dapat tercapai dikarenakan pada tahun tersebut tidak ada pemeringkatan koperasi dikarenakan tidak ada dana, sedangkan pada tahun 2019 target capaian tidak dapat tercapai dikarenakan jumlah koperasi yang dilakukan pemeringkatan hanya 9 koperasi dikarenakan keterbatasan dana.

Tabel III. Perbandingan dengan Kabupaten Kota Provinsi

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Realisasi Kabupaten Banjar	Realisasi Kabupaten Tanah Laut	Realisasi Kota Banjarmasin	Provinsi Kalimantan Selatan
1.	Persentase koperasi berkualitas	23.48%	-	-	-	-

Perbandingan realisasi kinerja dengan Kabupaten Kota Provinsi di Kalimantan Selatan pada capaian kinerja tahun 2019 tidak ada data pembandingan dikarenakan Indikator yang digunakan tiap kabupaten kota berbeda.

Tabel IV. RPJMD dan Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Target RPJMD Tahun 2021	Target Nasional RPJMN Tahun 2019
1.	Persentase koperasi berkualitas	23.48%	35%	-

Realisasi kinerja indikator “Persentase Koperasi Berkualitas” tahun 2019 adalah 23,48 masih terdapat selisih sebesar 11,52 dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021 adalah 35. Hal ini berarti Persentase Koperasi Berkualitas akan terus menjadi perhatian.

Target RPJMD pada Indikator “Persentase Koperasi Berkualitas” tahun 2021 bisa mencapai target yang ditetapkan dengan melakukan pemeringkatan koperasi sebanyak mungkin setiap tahunnya, Serta meningkatkan pembinaan pada manajemen koperasi agar tertib administrasi.

Realisasi Anggaran (program yang mendukung sasaran)

No.	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)
A.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			
	1. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi berprestasi	79.140.500	78.640.500	500.000
	2. Penyuluhan Perkoperasian	65.550.000	65.550.000	0
	3. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi	84.740.000	83.041.000	1.699.000
	4. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi (DAK)	275.800.000	269.772.350	6.027.650

**2.1. Indikator Persentase Wirausaha Baru**

Sasaran Meningkatkan produktivitas Usaha Mikro dan Pertumbuhan UMKM Baru dipilih dengan maksud untuk menggambarkan peningkatan produktivitas usaha mikro dan jumlah wirausaha baru oleh pemerintah Kota Banjarbaru, dengan indikator Persentase Wirausaha Baru. Indikator Persentase Wirausaha Baru menunjukkan kemampuan pembinaan pemerintah kota kepada masyarakat untuk berwirausaha dan terdaftar.

Pengukuran Indikator Persentase Wirausaha Baru berdasarkan jumlah IUMK yang telah terbit di kecamatan-kecamatan di Kota Banjarbaru.

Adapun capaian Persentase Wirausaha Baru menggunakan rumus jumlah wirausaha baru dibagi dengan jumlah UMKM binaan dikalikan seratus persen adalah sebagai berikut :

Tabel I Capaian 2019

No.	Indikator	Satuan	Uraian Kinerja Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Wirausaha Baru	%	23,97	24,82 (458 / 1845)	103,55%

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel diatas menunjukan bahwa realisasi kinerja tercapai melebihi target, dimana target kinerja ditentukan 23,97% dan terealisasi pada 24,82% sehingga capaian kinerjanya sebesar 103,55% (perhitungan realisasi 24,82 : target 23,97 X 100%).

Pada Tahun 2019 jumlah UMKM Binaan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banjarbaru sebanyak 1.845 Bidang Usaha sedangkan Data UMKM Baru sebanyak 332 pada berbagai bidang usaha.

Adapun kegiatan pelatihan dan pembinaan terhadap UMKM meliputi :

- Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
- Peningkatan SDM UMKM melalui bimtek
- Sosialisasi dan pemberian sertifikasi halal bagi produk makanan/minuman UMKM



- d. Kegiatan pameran Banjarbaru Fair
- e. Kegiatan Pameran Kalsel Expo
- f. Bazar UMKM
- g. Bimtek perluasan akses pasar dan fasilitasi perluasan akses pasar dengan ritel
- h. Pembinaan dan penatausahaan USP koperasi dan lembaga keuangan mikro (LKM)
- i. Pendampingan UMKM oleh konsultan pendamping PLUT-KUMKM Kota Banjarbaru

Rekapitulasi Data UMKM Baru  
Perbidang Usaha  
Tahun 2019

NO	KECAMATAN	BIDANG							
		Kuliner	Fashion	Pendidikan	Otomotif	Agribisnis	Jasa	Bidang Lainnya	UMKM
1	Banjarbaru Selatan	77	8	0	1	3	11	53	153
2	Banjarbaru Utara	59	8	1	0	1	13	28	110
3	Cempaka	11	18	0	0	0	1	12	42
4	Landasan Ulin	57	3	0	3	5	8	33	109
5	Liang Anggang	22	1	1	1	1	1	17	44
<b>Total Keseluruhan</b>		226	38	2	5	10	34	143	<b>458</b>

Rekapitulasi Data UMKM Binaan  
Perbidang Usaha  
Tahun 2019

NO	KECAMATAN	BIDANG							
		Kuliner	Fashion	Pendidikan	Otomotif	Agribisnis	Jasa	Bidang Lainnya	UMKM
1	Banjarbaru Selatan	295	18	0	7	0	32	255	607
2	Banjarbaru Utara	233	19	1	25	5	45	268	596
3	Cempaka	70	31	0	3	0	7	82	193
4	Landasan Ulin	110	17	1	10	5	12	101	256
5	Liang Anggang	84	8	1	5	10	13	72	193
<b>Total Keseluruhan</b>		792	93	3	50	20	109	778	<b>1845</b>

Tabel II Perbandingan 2 tahun terakhir

No.	Indikator Kinerja	2017		2018		2019	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Wirausaha Baru	11,51%	81,63%	19,31%	101,42	24,82	103,55%

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (2 tahun terakhir) terdapat peningkatan dari tahun 2017 dengan realisasi 11,51% , tahun 2018 dengan realisasi 19,31% dan tahun 2019 dengan realisasi 24,82 dengan capaian kinerja tahun 2017 sebesar 81,6%, tahun 2018 sebesar 101,4%, tahun 2019 sebesar 103,55%. Hal ini dikarenakan wirausaha baru di Kota Banjarbaru semakin tahun semakin meningkat.

Pertumbuhan wirausaha baru yang terus meningkat dari tahun ke tahun masih didominasi oleh sektor kuliner oleh karena itu pelatihan yang dilakukan meliputi pelatihan pengolahan makanan dan pemberian sertifikat produk berupa sertifikat halal pada produk makanan serta Forum Kreatif Banjarbaru sebagai wadah sharing bagi UMKM di Kota Banjarbaru dan adanya PLUT-KUMKM Kota Banjarbaru sebagai tempat konsultasi dan pendampingan bagi UMKM dan Calon Wirausaha untuk konsultasi usaha dan permodalan.

Tabel III. Perbandingan dengan Kabupaten Kota Provinsi

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Realisasi Kabupaten Banjar	Realisasi Kabupaten Tanah Laut	Realisasi Kota Banjarmasin	Provinsi Kalimantan Selatan
1.	Persentase Wirausaha Baru	24,82%	-	-	-	-

Perbandingan realisasi kinerja dengan Kabupaten Kota Provinsi di Kalimantan Selatan pada capaian kinerja tahun 2019 tidak ada data pembandingan dikarenakan Indikator yang digunakan tiap kabupaten kota berbeda.

Tabel IV. RPJMD dan Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Target RPJMD Tahun 2021	Target Nasional RPJMN Tahun 2019
1.	Persentase Wirausaha Baru	24,82%	33,85%	-

Realisasi kinerja indikator “Persentase Wirausaha Baru” tahun 2019 adalah 24,82 masih terdapat selisih sebesar 9,03 dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021 adalah 33,85. Hal ini berarti Persentase Wirausaha Baru akan terus menjadi perhatian.

Target RPJMD pada Indikator “Persentase Wirausaha Baru” tahun 2021 bisa mencapai target yang ditetapkan dengan melakukan upaya meningkatkan produktivitas Usaha Mikro dan Pertumbuhan UMKM Baru dalam meningkatkan perekonomian di Kota Banjarbaru diantaranya berupa Beberapa kegiatan pelatihan dan pembinaan, pendampingan, fasilitasi promosi dan pameran, maupun menjalin kemitraan dengan lembaga pemerintah maupun swasta.

## 2.2. Indikator Persentase peningkatan omzet Usaha Mikro

Sasaran Meningkatnya produktivitas Usaha Mikro dan Pertumbuhan UMKM baru dipilih dengan menunjukkan peningkatan omzet rata-rata UMKM Kota Banjarbaru yang telah dibina pada periode RPJMD perubahan periode 2016-2021. Sebagai alat ukur capaian sasaran ditentukan indikator kinerja yang dapat menunjukkan meningkatnya omzet UMKM di Kota Banjarbaru. Indikator kinerja tersebut adalah Persentase peningkatan omzet Usaha Mikro.

Penilaian terhadap indikator Persentase peningkatan omzet Usaha Mikro menggunakan perhitungan “Jumlah omzet tahun sekarang - jumlah omzet tahun lalu / jumlah Omzet Tahun lalu”.

Tabel I Capaian 2019

No.	Indikator	Satuan	Uraian Kinerja Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase peningkatan omzet Usaha Mikro	%	10%	10% (47.797.383.121 - 43.361.776.341/ 43.361.776.341)	100%

Realisasi Indikator Sasaran “Persentase peningkatan omzet Usaha Mikro” pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 10% dan terealisasi 10% dengan capaian kinerja 100% (Kategori Baik).

Pada tahun 2018 Total omzet Usaha Mikro Binaan di Kota Banjarbaru mencapai Rp. 43.361.776.341,-. sedangkan tahun 2019 Total omzet Usaha Mikro Binaan di Kota Banjarbaru mencapai Rp. 47.797.383.121,-.

Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru difokuskan pada Usaha Mikro sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2015 memiliki kriteria antara lain :

- ❖ Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- ❖ Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Kategori omzet Usaha Mikro tahun 2019 yang dibina :

No.	Kategori Omzet Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro
1	Omzet Usaha Mikro <= Rp. 20.000.000,-	459
2	Omzet Usaha Mikro > Rp. 20.000.000 s/d Rp. 30.000.000,-	955
3	Omzet Usaha Mikro > Rp. 30.000.000 s/d Rp. 40.000.000,-	306
4	Omzet Usaha Mikro > Rp. 40.000.000 s/d Rp. 50.000.000,-	83
5	Omzet Usaha Mikro > Rp. 50.000.000 s/d Rp. 80.000.000,-	40
6	Omzet Usaha Mikro > Rp. 80.000.000	2
	Total	1845

Persentase kenaikan omzet Usaha Mikro tahun 2019 yang dibina dari omzet tahun 2018 :

No.	Kategori Omzet Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro
1	Kenaikan Omzet Usaha Mikro <= 10%	1313
2	Kenaikan Omzet Usaha Mikro > 10% s/d 20%	125
3	Kenaikan Omzet Usaha Mikro > 20% s/d 30%	75

4	Kenaikan Omzet Usaha Mikro > 30% s/d 40%	104
5	Kenaikan Omzet Usaha Mikro > 40%	228
	Total	1845

Pada tahun 2019, Kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja meliputi :

- a. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
- b. Sosialisasi dan pemberian sertifikasi halal bagi UMKM
- c. Kegiatan pameran Banjarbaru Fair
- d. Kegiatan Pameran Kalsel Expo
- e. Bazar UMKM
- f. Bimtek perluasan akses pasar dan fasilitasi perluasan akses pasar dengan ritel
- g. Pembinaan dan penatausahaan USP koperasi dan lembaga keuangan mikro (LKM)

Tabel II Perbandingan 2 tahun terakhir

No.	Indikator Kinerja	2017		2018		2019	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Persentase peningkatan omzet Usaha Mikro	-	-	9%	100%	10%	100%

Realisasi kinerja indikator “Persentase peningkatan omzet Usaha Mikro” tahun 2017 tidak ada data dikarenakan ini indikator baru dan tahun 2018 9 % dan tahun 2019 adalah 10% sehingga terlihat kenaikan yang menggambarkan peningkatan omzet Usaha Mikro di Kota Banjarbaru.

Tabel III. Perbandingan dengan Kabupaten Kota Provinsi

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Realisasi Kabupaten Banjar	Realisasi Kabupaten Tanah Laut	Realisasi Kota Banjarmasin	Provinsi Kalimantan Selatan
1.	Persentase peningkatan omzet Usaha Mikro	10%	-	-	-	-

Perbandingan realisasi kinerja dengan Kabupaten Kota Provinsi di Kalimantan Selatan pada capaian kinerja tahun 2019 tidak ada data pembandingan dikarenakan Indikator yang digunakan tiap kabupaten kota berbeda.

Tabel IV. RPJMD dan Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Target RPJMD Tahun 2021	Target Nasional RPJMN Tahun 2019
1.	Persentase peningkatan omzet Usaha Mikro	10%	12%	-

Realisasi kinerja indikator “Persentase peningkatan omzet Usaha Mikro” tahun 2019 adalah 10% masih terdapat selisih sebesar 2% dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021 adalah 12%. Hal ini berarti Persentase peningkatan omzet Usaha Mikro akan terus menjadi perhatian.

Target RPJMD pada Indikator “Persentase peningkatan omzet Usaha Mikro” tahun 2021 bisa mencapai target yang ditetapkan dengan melakukan upaya meningkatkan produktivitas Usaha Mikro dan Pertumbuhan UMKM Baru dalam meningkatkan perekonomian di Kota Banjarbaru diantaranya berupa Beberapa kegiatan pelatihan dan pembinaan, pendampingan, fasilitasi promosi dan pameran, maupun menjalin kemitraan dengan lembaga pemerintah maupun swasta.

Realisasi Anggaran (program yang mendukung sasaran)

No.	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)
A.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah			
	1. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	165.448.000	161.998.000	3.450.000
	2. Sarana Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	428.485.000	411.735.000	16.750.000
B	Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif			
	1 Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	13.088.000	12.638.000	450.000
	2. Pengembangan Usaha Kecil Menengah	301.000.000	297.950.000	3.050.000
	3. Perluasan Akses Pasar bagi produk UMKM	42.100.000	39.520.000	2.580.000

## 3.

**SASARAN STRATEGIS****Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka**

Sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dipilih dengan maksud untuk menggambarkan perbandingan jumlah Penganggur dengan jumlah Angkatan Kerja ditingkat Pemerintah Kota Banjarbaru pada periode RPJMD tahun 2016-2021, dengan indikator kinerja yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka. Indikator ini menunjukkan suatu nilai persentase perbandingan jumlah Penganggur dengan jumlah Angkatan Kerja, penurunan persentase dapat diindikasikan penyerapan tenaga kerja meningkat, tetapi jika persentase meningkat kemungkinan faktor yang mempengaruhinya adalah terjadinya peningkatan jumlah Angkatan Kerja sebagai akibat dari meningkatnya laju pertumbuhan penduduk.

Pengukuran Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarbaru.

Cara perhitungan menentukan Tingkat Pengangguran Terbuka melalui jumlah pencari kerja dibagi dengan angkatan kerja dikalikan seratus persen

Tabel I Capaian 2019

No.	Indikator	Satuan	Uraian Kinerja Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,10	5,06	117,05%

Sumber data : BPS Kota Banjarbaru

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja tercapai melebihi target, dimana target kinerja ditentukan 6,10 dan terealisasi pada 5,06 sehingga capaian kinerjanya sebesar 117,05% ((perhitungan target 6,10 – (realisasi 5,06 – 6,10)) : target 6,10 X 100%).

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka menurunnya tingkat pengangguran yaitu melalui meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. Sedangkan kebijakannya yakni dengan Pelayanan Informasi Ketenagakerjaan melalui Penyebarluasan Informasi Tenaga Kerja.



Upaya lain yang dilakukan adalah dengan pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai indikator menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka adalah :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja
- b. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
- c. Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat

#### Data Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan

Kota Banjarbaru Tahun 2019

No	Pendidikan	Pengangguran
1	Tidak/Belum Pernah Sekolah/Belum Tamat SD	216
2	Sekolah Dasar	745
3	Sekolah Menengah Pertama	891
4	Sekolah Menengah Atas	3.069
5	Diploma I/II/III/Akademi	171
6	Universitas	1.088
<b>Total</b>		<b>6.180</b>

*Sumber : BPS Kota Banjarbaru*

#### Data Pengangguran Menurut Jenis Kelamin

Kota Banjarbaru Tahun 2019

No	Jenis Kelamin	Pengangguran
1	Laki-laki	3.482
2	Perempuan	2.698
<b>Total</b>		<b>6.180</b>

*Sumber : BPS Kota Banjarbaru*

Data Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan  
Kota Banjarbaru Tahun 2019

No	Pendidikan	Angkatan Kerja
1	Tidak/Belum Pernah Sekolah/Belum Tamat SD	13.233
2	Sekolah Dasar	13.762
3	Sekolah Menengah Pertama	18.698
4	Sekolah Menengah Atas	45.433
5	Diploma I/II/III/Akademi	4.168
6	Universitas	26.869
<b>Total</b>		<b>122.163</b>

*Sumber : BPS Kota Banjarbaru*

Data Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin  
Kota Banjarbaru Tahun 2019

No	Jenis Kelamin	Angkatan Kerja
1	Laki-laki	77.655
2	Perempuan	44.508
<b>Total</b>		<b>122.163</b>

*Sumber : BPS Kota Banjarbaru*

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru pada Tahun 2019 jumlah pengangguran di Kota Banjarbaru sebanyak 6.180 orang sedangkan Jumlah angkatan kerja sebanyak 122.163 orang. Sehingga data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Banjarbaru pada tahun 2019 mencapai 5,06 persen. Pengertian Tingkat Pengangguran Terbuka adalah kecenderungan pengangguran terhadap angkatan kerja. Jumlah pengangguran di Kota Banjarbaru pada tahun 2019 sebanyak 6.180 orang, sedangkan angkatan kerja di Kota Banjarbaru pada tahun 2019 sebanyak 122.163 orang. Jumlah penganggur berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh laki-laki sebanyak 3.482 orang, sedangkan penganggur berjenis kelamin perempuan sebanyak 2.698 orang. Apabila dibandingkan dengan persentase penganggur terhadap angkatan kerja berdasarkan jenis kelamin, maka TPT laki-laki sebesar 4,48 persen, sedangkan TPT perempuan sebesar 6,06 persen. Pengangguran terbuka berdasarkan tingkat pendidikan diketahui bahwa tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas merupakan penyumbang pengangguran terbesar yaitu sebanyak

3.069 orang, disusul oleh pengangguran terbuka dengan tingkat pendidikan Universitas sebanyak 1.088 orang.

Penduduk yang bekerja di Kota Banjarbaru pada tahun 2019 adalah sebanyak 115.983 orang terdiri dari 74.173 laki-laki dan 41.810 perempuan. Jenis pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja masih ada pada jenis pekerjaan Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel, disusul oleh jenis pekerjaan Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan, kemudian oleh jenis pekerjaan Industri Pengolahan.

Dari uraian sebelumnya diketahui bahwa pengangguran di Kota Banjarbaru pada tahun 2019 masih didominasi oleh penganggur berjenis kelamin laki-laki, namun demikian apabila dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya, maka dapat terlihat peningkatan dari penganggur berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 1.998 orang di tahun 2018 meningkat menjadi 2.698 orang di tahun 2019. Di sisi lain tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan cenderung turun yaitu 52,02 persen di tahun 2018 menjadi 47,62 persen di tahun 2019.

Berdasarkan kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penurunan TPAK perempuan menyebabkan peningkatan pengangguran berjenis kelamin perempuan. Selain itu pertumbuhan kesempatan kerja bagi perempuan cenderung tidak proporsional dengan peningkatan pencari kerja baru. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan TPAK perempuan sehingga dapat mengurangi pengangguran, selain itu perlu dilakukan intervensi dalam menumbuhkan kesempatan kerja bagi perempuan dan control terhadap SMK khususnya bagi program kompetensi yang diminati oleh remaja putri untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja.

Tabel II Perbandingan 2 tahun terakhir

No.	Indikator Kinerja	2017		2018		2019	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,51%	111,13%	5,20%	115,45	5,06%	117,05%

Realisasi kinerja indikator “Tingkat Pengangguran Terbuka” tahun 2017 adalah 5,51 dan tahun 2018 adalah 5,20 dan tahun 2019 adalah 5,06 sehingga

terlihat penurunan sebesar 0,14 hal ini menggambarkan pengangguran di Kota Banjarbaru semakin tahun semakin menurun.

Tabel III. Perbandingan dengan Kabupaten Kota Provinsi

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Realisasi Kabupaten Banjar	Realisasi Kabupaten Tanah Laut	Realisasi Kota Banjarmasin	Provinsi Kalimantan Selatan
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,06%	3,01%	3,41%	7,69%	4,31%

Realisasi kinerja indikator “Tingkat Pengangguran Terbuka” tahun 2019 pada Kota Banjarbaru adalah 5,06% dan pada Kabupaten Banjar 3,01% dan pada Kabupaten Tanah Laut 3,41% dan Kota Banjarmasin 7,69 sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan 4,31%. Hal ini menjadikan Tingkat Pengangguran di Kota Banjarbaru harus menjadi perhatian dikarenakan masih tinggi dibandingkan dengan Provinsi dan Kabupaten sekitar.

Tabel IV. RPJMD dan Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Target RPJMD Tahun 2021	Target Nasional RPJMN Tahun 2019
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,06%	5,95%	5%

Realisasi kinerja indikator “Tingkat Pengangguran Terbuka” tahun 2019 adalah 5,06% dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2021 sudah melebihi target tersebut tetapi untuk target Nasional adalah 5%. Angka ini berarti untuk wilayah Pemerintah Kota Banjarbaru untuk Tingkat Pengangguran Terbuka telah belum mencapai target nasional dan akan terus menjadi perhatian.

Realisasi Anggaran (program yang mendukung sasaran)

No.	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)
A.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			
	1. Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja	523.667.600	515.658.100	8.009.500
B	Program Peningkatan Kesempatan Kerja			
	1. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	53.304.000	53.304.000	0
	2. Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbaris Masyarakat	217.815.480	217.764.250	51.230

## 4.

**SASARAN STRATEGIS****Menurunnya Kasus Ketenagakerjaan**

Sasaran menurunnya kasus ketenagakerjaan dipilih dengan maksud untuk menggambarkan penurunan kasus Ketenagakerjaan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dengan Indikator Persentase Perusahaan Yang Berkasus Tentang Ketenagakerjaan. Indikator Persentase Perusahaan Yang Berkasus Tentang Ketenagakerjaan ini menjelaskan tentang jumlah kasus yang terjadi pada perusahaan wajib lapor di Kota Banjarbaru antara pekerja dengan perusahaan.

Pengukuran Indikator Persentase Perusahaan Yang Berkasus Tentang Ketenagakerjaan berdasarkan jumlah kasus ketenagakerjaan yang terjadi di Kota Banjarbaru antara pekerja dengan perusahaan.

Cara perhitungan menentukan Persentase Perusahaan Yang Berkasus Tentang Ketenagakerjaan ini melalui jumlah kasus yang terjadi dibagi jumlah perusahaan wajib lapor dikali seratus persen.

Tabel I Capaian 2019

No.	Indikator	Satuan	Uraian Kinerja Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Perusahaan Yang Berkasus Tentang Ketenagakerjaan	%	2,5%	2,38% (10 / 420) x100)	104,8%

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel diatas menunjukan bahwa realisasi Indikator Sasaran “Persentase Perusahaan Yang Berkasus Tentang Ketenagakerjaan” pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 2,5 dan terealisasi 2,38 dengan capaian kinerja 104,8% (Kategori Baik Sekali)

Jumlah perusahaan wajib lapor di Kota Banjarbaru pada Tahun 2019 berjumlah 420 perusahaan.

### Data kasus ketenagakerjaan pada Tahun 2019

No.	Nama Perusahaan	Almt Prsh	Hasil	Nama Pekerja
1	PT. Concrete Karya Utama	Liang Anggang	Anjuran	Ponirin
2	PT. Anindya Wiraputra Konsult	Landasan Ulin	PB	Muhammad Hadi
3	PT. Timur Satria Perkasa	Banjarbaru	Anjuran	Maryani Kardi
4	PT. Obor Baru Anugerah	Banjarbaru	PB	Susanto
5	PT. Catur Sedulur	Banjarbaru	PB	Agung Mujiyanto (19 org)
6	CV. Bintang Mulia Bara	Banjarbaru	PB	Bambang Sukarno
7	PT. Inhutani III	Guntung Manggis	Anjuran	Heru Iswahyudi
8	PT. Inhutani III	Guntung Manggis	Anjuran	Erwin Bob, SE
9	PT. Inhutani III	Guntung Manggis	PB & Anjuran	Ir. Zulkifli
10	Badan Pengelola Padang Golf Swargaloka	Banjarbaru	PB	Soekatno

Berdasarkan tabel di atas data kasus yang masuk sampai 31 Desember 2019 di Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru berjumlah 10 kasus. Dari 10 kasus tersebut 6 kasus dapat diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) ditingkat mediasi dan 4 kasus diselesaikan melalui mediasi (buntu tingkat mediasi) oleh tim mediator diteruskan anjuran ke pengadilan hubungan industrial di Banjarmasin.

Tabel II Perbandingan 2 tahun terakhir

No.	Indikator Kinerja	2017		2018		2019	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Perusahaan Yang Berkasus Tentang Ketenagakerjaan	2,6%	100%	2,91%	85,88%	2,38%	104,8%

Realisasi kinerja indikator “Persentase Perusahaan Yang Berkasus Tentang Ketenagakerjaan” tahun 2017 adalah 2,6 dan tahun 2018 adalah 2,91 kemudian tahun 2019 adalah 2,38 sehingga terlihat penurunan sebesar 0,53 hal ini menggambarkan Persentase Perusahaan Yang Berkasus Tentang Ketenagakerjaan menurun.

Jumlah kasus yang terjadi masih didominasi oleh kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Tabel III. Perbandingan dengan Kabupaten Kota Provinsi

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Realisasi Kabupaten Banjar	Realisasi Kabupaten Tanah Laut	Realisasi Kota Banjarmasin	Provinsi Kalimantan Selatan
1.	Persentase Perusahaan Yang Berkasus Tentang Ketenagakerjaan	2,38%	-	-	-	-

Perbandingan realisasi kinerja dengan Kabupaten Kota Provinsi di Kalimantan Selatan pada capaian kinerja tahun 2019 tidak ada data pembandingan dikarenakan Indikator yang digunakan tiap kabupaten kota berbeda.

Tabel IV. RPJMD dan Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Target RPJMD Tahun 2021	Target Nasional RPJMN Tahun 2019
1.	Persentase Perusahaan Yang Berkasus Tentang Ketenagakerjaan	2,38%	2,40%	-

Realisasi kinerja indikator “Persentase Perusahaan Yang Berkasus Tentang Ketenagakerjaan” tahun 2019 adalah 2,38 masih terdapat selisih sebesar 0,02 dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021 adalah 2,40. Hal ini berarti Persentase Perusahaan Yang Berkasus Tentang Ketenagakerjaan sudah melebihi target RPJMD.

Keberhasilan yang dicapai dalam mencapai target indikator “Persentase Perusahaan Yang Berkasus Tentang Ketenagakerjaan” tersebut dikarenakan : Jumlah tenaga teknis penyelesaian kasus mencukupi dalam pelaksanaan kegiatan penyelesaian kasus PHI/PHK.



Realisasi Anggaran (program yang mendukung sasaran)

No.	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)
A.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan			
	1. Fasilitas Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	41.474.500	31.974.500	9.500.000
	2. Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	42.428.500	23.462.500	18.966.000
	3. Sosialisasi Upah Minimum Provinsi Kalimantan Selatan	21.993.000	18.993.000	3.000.000
	4. Pembinaan dan Penyuluhan Kelembagaan Ketenagakerjaan	9.473.700	8.161.200	1.312.500
	5. Penyuluhan Kelembagaan Ketenagakerjaan	15.985.200	15.155.200	830.000
	6. Forum Lembaga Kerjasama Tripartit	21.710.750	18.068.750	3.642.000
	7. Pembinaan Jaminan Sosial	25.184.000	24.734.000	450.000

B. Realisasi Anggaran

Sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2019 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru ditunjang dengan sumber dana APBD sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2019		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Tidak Langsung • Gaji dan Tunjangan	4.893.879.330 4.893.879.330	4.797.797.779 4.797.797.779	98,04
2.	Belanja Langsung • Belanja Pegawai • Belanja Barang dan Jasa • Belanja Modal	3.923.949.220 231.855.000 3.525.921.470 166.172.750	3.751.745.353 214.555.000 3.375.795.353 161.395.000	95,61

Untuk Belanja Tidak Langsung dari anggaran Rp 4.893.879.330,- telah direalisasikan dengan belanja SKPD sampai per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 4.797.797.779,- Sedangkan untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 3.923.949.220,- terealisasi dengan belanja SKPD sampai per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 3.751.745.353,- Sedangkan sisa anggaran Rp. 268.285.418,-

Yang tertuang dalam beberapa kegiatan-kegiatan yaitu sebagai berikut :

❖ Belanja Tidak Langsung

Untuk memberikan kompensasi terhadap para pegawai negeri sipil Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dalam wujud gaji dan tunjangan yang digunakan dengan anggaran sebesar Rp 4.893.879.330,- yang terealisasi sebesar Rp 4.797.797.779,- atau sebesar 98,04%

❖ Belanja Langsung

Data analisis akuntabilitas kinerja keuangan pada masing-masing Sasaran Strategik dan Capaian Sasaran Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Program / Kegiatan	Anggaran			Presentasi (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>845.109.560</b>	<b>775.778.303</b>	<b>69.331.257</b>	<b>91,80</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125.052.560	92.483.713	32.568.847	73,96	100
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	33.600.000	33.600.000	0	100,00	100
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	48.000.000	48.000.000	0	100,00	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.705.000	19.705.000	0	100,00	100
	Penyediaan Peralatan dan	31.392.000	31.342.000	50.000	99,84	100

No	Program / Kegiatan	Anggaran			Presentasi (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
1	2	3	4	5	6	7
	Perlengkapan Kantor					
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.200.000	7.200.000	0	100,00	100
	Penyediaan Makanan dan Minuman	125.280.000	105.309.000	19.971.000	84,06	100
	Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	230.000.000	229.958.590	41.410	99,98	100
	Penyediaan Jasa Non PNS	224.880.000	208.180.000	16.700.000	92,57	100
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>348.242.530</b>	<b>331.683.800</b>	<b>16.558.730</b>	<b>95,25</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	66.772.750	66.325.000	447.750	99,33	100
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	61.600.000	57.750.000	3.850.000	93,75	100
	Pengadaan Mebeleur	37.800.000	37.320.000	480.000	98,73	100
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	77.823.480	77.800.000	23.480	99,97	100
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	30.552.000	26.314.800	4.237.200	86,13	100
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	57.966.500	50.454.000	7.512.500	87,04	100
	Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	6.555.000	6.550.000	5.000	99,92	100
	Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	7.250.000	7.250.000	0	100,00	100
	Rutin / Berkala Mebeleur	1.922.800	1.920.000	2.800	99,85	100
<b>3.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>61.487.900</b>	<b>60.847.900</b>	<b>640.000</b>	<b>98,96</b>	<b>100</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	32.133.500	32.133.500	0	100,00	100
	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	21.500.000	21.500.000	0	100,00	100
	Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	7.854.400	7.214.400	640.000	91,85	100

No	Program / Kegiatan	Anggaran			Presentasi (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
1	2	3	4	5	6	7
<b>A.</b>	<b>Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah</b>					
<b>4.</b>	<b>Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif</b>	<b>356.188.000</b>	<b>350.108.000</b>	<b>6.080.000</b>	<b>98,29</b>	<b>100</b>
	Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	13.088.000	12.638.000	450.000	96,56	100
	Pengembangan Usaha Kecil Menengah	301.000.000	297.950.000	3.050.000	98,99	100
	Perluasan Akses Pasar bagi produk UMKM	42.100.000	39.520.000	2.580.000	93,87	100
<b>5.</b>	<b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah</b>	<b>676.133.000</b>	<b>655.933.000</b>	<b>20.200.000</b>	<b>97,01</b>	<b>100</b>
	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	165.448.000	161.998.000	3.450.000	97,91	100
	Sarana Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	428.485.000	411.735.000	16.750.000	96,09	100
	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan (DAK)	82.200.000	82.200.000	0	100,00	
<b>6.</b>	<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>	<b>77.393.500</b>	<b>74.703.500</b>	<b>2.690.000</b>	<b>96,52</b>	<b>100</b>
	Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	34.686.500	33.796.500	890.000	97,43	100
	Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Masyarakat	42.707.000	40.907.000	1.800.000	95,79	100
<b>7.</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	<b>570.540.000</b>	<b>562.313.350</b>	<b>8.226.650</b>	<b>98,56</b>	<b>100</b>
	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi berprestasi	79.140.500	78.640.500	500.000	99,37	100
	Penyuluhan Perkoperasian	65.550.000	65.550.000	0	100,00	100

No	Program / Kegiatan	Anggaran			Presentasi (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
1	2	3	4	5	6	7
	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi	84.740.000	83.041.000	1.699.000	98,00	100
	Pembinaan dan Pembenahan Kelompok Usaha Rakyat	65.309.500	65.309.500	0	100,00	100
	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi (DAK)	275.800.000	269.772.350	6.027.650	97,81	100
<b>B</b>	<b>Urusan Tenaga Kerja</b>					
<b>8.</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>523.667.600</b>	<b>515.658.100</b>	<b>8.009.500</b>	<b>98,47</b>	<b>100</b>
	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja	523.667.600	515.658.100	8.009.500	98,47	100
<b>9.</b>	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>	<b>271.119.480</b>	<b>271.068.250</b>	<b>51.230</b>	<b>99,98</b>	<b>100</b>
	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	53.304.000	53.304.000	0	100,00	100
	Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbaris Masyarakat	217.815.480	217.764.250	51.230	99,98	100
<b>10.</b>	<b>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>	<b>194.067.650</b>	<b>153.651.150</b>	<b>40.416.500</b>	<b>79,17</b>	<b>100</b>
	Fasilitas Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	41.474.500	31.974.500	9.500.000	77,09	100
	Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	42.428.500	23.462.500	18.966.000	55,30	100
	Sosialisasi Upah Minimum Provinsi Kalimantan Selatan	21.993.000	18.993.000	3.000.000	86,36	100
	Pembinaan dan Penyuluhan Kelembagaan Ketenagakerjaan	9.473.700	8.161.200	1.312.500	86,15	100
	Penyuluhan Kelembagaan Ketenagakerjaan	15.985.200	15.155.200	830.000	94,81	100
	Forum Lembaga	21.710.750	18.068.750	3.642.000	83,22	100

No	Program / Kegiatan	Anggaran			Presentasi (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
1	2	3	4	5	6	7
	Kerjasama Tripartit					
	Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	15.818.000	13.102.000	2.716.000	82,83	100
	Pembinaan Jaminan Sosial	25.184.000	24.734.000	450.000	98,21	100
	<b>TOTAL</b>	<b>3.923.949.220</b>	<b>3.751.745.353</b>	<b>172.203.867</b>	<b>95,61</b>	<b>100</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan kinerja (LAKIP) tahun 2019 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mendukung pencapaian tujuan/sasaran strategis Pemerintah Kota Banjarbaru. Penyusunan Laporan Kinerja juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja organisasi.

Selain itu, Laporan Kinerja menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan demi perbaikan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan Kinerja, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan Kinerja sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan SKPD untuk meningkatkan kinerja SKPD melalui perbaikan pelayanan publik.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mengacu surat edaran Walikota Nomor : 065/1064/ORG bahwa Laporan Kinerja SKPD dibuat selambat-lambatnya satu bulan setelah akhir tahun pelaksanaan anggaran untuk dijadikan bahan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru.

Dari hasil pengukuran pada 4 (empat) sasaran strategis pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru, disimpulkan

bahwa 3 (tiga) sasaran dapat tercapai dengan mendapat predikat Sangat Tinggi dan 1 (satu) sasaran dapat tercapai dengan mendapat predikat Tinggi, walau demikian masih terdapat permasalahan yang dihadapi dalam mencapai sasaran tersebut diantaranya :

1. Kurang terbukanya koperasi apabila diadakan pembinaan, monitoring dan evaluasi
2. Belum meratanya Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi yang kompeten dalam mengelola organisasi dan usaha koperasi.
3. Masih belum dilakukan pemutakhiran data UMKM dan teraplikasi dengan benar.
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pembinaan, pemberdayaan dan promosi UMKM.
5. Masih banyaknya UMKM yang belum memiliki perijinan yang sesuai.
6. Akses pasar UMKM masih terbatas pada pasar lokal dan pasar regional.
7. Dalam pengembangan usaha para pelaku usaha sebagian tidak memiliki agunan dalam memenuhi persyaratan pengajuan pinjaman sebagai tambahan modal usaha.
8. Pekerja dan pengusaha masih banyak yang belum melaporkan penempatan tenaga kerja kepada petugas penempatan tenaga kerja.
9. Kurangnya sarana dan prasarana untuk kegiatan pelatihan dan monitoring ke lapangan.
10. Pengusaha dan pekerja terjadi keluhan kesah tentang penerapan ketentuan ketenagakerjaan dalam hubungan kerja.
11. Pengusaha belum sepenuhnya mengikutkan para pekerja menjadi peserta BPJS.
12. Perusahaan belum membuat/memperpanjang peraturan perusahaan yang menjadi pedoman hubungan industrial antara pengusaha dan kerja.

Untuk mensikapi permasalahan tersebut upaya yang ditempuh dimasa depan adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan Focus Group Discussion (FGD) semua koperasi se Kota Banjarbaru.



2. Melakukan pelatihan peningkatan kapasitas dan kualitas bagi Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi.
3. Melakukan pemutakhiran data UMKM dan melakukan integrasi data dengan dinas terkait.
4. Perlu diadakan sarana dan prasarana pendukung seperti mobil operasional.
5. Melakukan sosialisasi kepada UMKM tentang perijinan.
6. Mengupayakan UMKM untuk dapat mengikuti berbagai pameran dan promosi berskala nasional.
7. Lebih mengoptimalkan hubungan interaksi dengan perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya melalui kegiatan sosialisasi dan informasi dalam perolehan modal.
8. Melakukan sosialisasi ke perusahaan untuk data penempatan tenaga kerja.
9. Perlu diadakan kendaraan operasional untuk kegiatan pelatihan dan monitoring ke lapangan.
10. Melakukan pendekatan persuasif adanya keluhan kesah para pihak terkait adanya perselisihan hubungan industrial dan melalui mediasi.
11. Melakukan monitoring dan pembinaan kepatuhan kepesertaan BPJS ke perusahaan dan melakukan sosialisasi.
12. Melakukan pembinaan kepatuhan untuk membuat peraturan perusahaan melalui surat edaran dan mengadakan kegiatan sosialisasi untuk ketaatan membuat peraturan perusahaan.

## **LAMPIRAN - LAMPIRAN**

**PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2019**  
**DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA**  
**KOTA BANJARBARU**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kriteria
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )
1.	Meningkatnya kualitas koperasi yang berdaya saing	Persentase Koperasi yang berkualitas	30%	23,48%	78,27	Baik (B)
2.	Meningkatnya produktivitas Usaha Mikro dan Pertumbuhan UMKM baru	Persentase wirausaha baru	23,97%	24,82%	103,55	Baik Sekali (B)
		Persentase peningkatan omzet Usaha Mikro	10%	10,00%	100	Baik (B)
3.	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,10%	5,06%	117,05	Baik Sekali (B)
4.	Menurunnya Kasus Ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan Yang Berkasus Ketenagakerjaan	2,5%	2,38%	104,80	Baik Sekali (B)

**PERBANDINGAN CAPAIAN SASARAN TAHUN SEBELUMNYA DAN SASARAN RPJMD**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2 Tahun Sebelumnya		Uraian Kinerja Tahun 2019			Target RPJMD 2021
			Tahun 2017	Tahun 2018	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Persentase Koperasi Berkualitas	%	22,32	19,84	30	23.48% (31 / 132 x100)	78,27%	35%
2.	Persentase Wirausaha baru	%	11,51	19,31	23,97	24,82 (458 / 1845)	103,55%	33,85%
3.	Persentase peningkatan omzet Usaha Mikro	%	NA	9	10	10% (47.797.383.121 - 43.361.776.341/ 43.361.776.341)	100%	12%
4.	Tingkat pengangguran terbuka	%	5,51	5,20	6,10	5,06% (6.180 / 122.163 x 100)	117,05%	5,95
5.	Persentase Perusahaan Yang Berkasus Tentang Ketenagakerjaan	%	2,6	2,91	2,5	2,38% (10 / 420) x100)	104,8%	2,4